

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Persoalan pendidikan merupakan hal penting untuk memajukan sebuah Negara. Jika sistem pendidikan di suatu Negara baik maka secara otomatis Negara tersebut digolongkan sebagai Negara maju. Terdapat benang merah antara kemapanan sistem pendidikan dengan kesuksesan roda pemerintahan. Sebenarnya semua persoalan yang ada di sebuah Negara akan dapat diatasi dengan kematangan pendidikan di sebuah Negara tersebut.

Krisis pendidikan dan kebudayaan akan berdampak pada krisis di segala bidang. Hal ini dikarenakan kerusakan dunia pendidikan akan mempengaruhi tatanan sosial yang lain termasuk sektor ekonomi, politik, agama, hukum. Maka dari itu, persoalan pendidikan menjadi hal penting untuk mensejahterakan masyarakat. Menjadi persoalan adalah banyak yang menganggap jika tanpa kesejahteraan maka pendidikan akan sulit di raih. Seperti isu lama yang sering dikumandangkan oleh para aktivis pendidikan seputar orang miskin dilarang sekolah.¹

Perdebatan seputar pendidikan memang tidak pernah pudar, seiring bertambahnya waktu serta mengarah ke masyarakat yang lebih mapan. Sejak sebelum merdeka hingga saat ini persoalan pendidikan masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Keseriusan dalam memperbaiki pendidikan

¹ Darmaningtias, *Pendidikan Rusak – Rusakan*. (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm. 325.

menjadi modal awal pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.

Ditinjau dari aspek sosiologi, kehidupan sosial manusia berlangsung dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Menurut teori fungsional, masyarakat merupakan suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, yang mempolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dipandang sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang saling berkaitan satu sama lain.

Persoalan pendidikan Islam menjadi perhatian yang serius, karena dianggap mampu untuk memperbaiki tatanan nilai masyarakat Indonesia. Apalagi agama Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas diantara sekian banyak agama yang diakui oleh pemerintah. Dengan demikian, meskipun Islam adalah agama mayoritas namun pola keberagaman yang dibangun oleh masyarakat multikultural di Indonesia adalah upaya untuk membangun keharmonisan sosial. Praktik keberagaman yang mereka kembangkan adalah upaya untuk mewujudkan prinsip ajaran agama masing - masing. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa upaya membangun kerukuan antar umat beragama tidak banyak ditentukan oleh semangat keagamaan, akan tetapi struktur sosial atau lingkungan sekitar yang berperan dalam membangun pola keberagaman.²

² Kunawi Basyir, *Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali* (Surabaya: ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman, Volume 8, Nomer 1, September 2013), hlm. 5-6.

Namun yang perlu digaris bawahi adalah, kondisi heterogenitas bangsa Indonesia ibarat pedang bermata ganda, di satu sisi kemajemukan bisa menjadi kekuatan konstruktif - produktif dalam rangka membangun bangsa. Hal ini bisa dilakukan ketika kita memiliki cetak - biru yang bisa dijadikan sebagai acuan normatif dalam mengelola heterogenitas sosial - budaya kita. Sejauh ini, Indonesia cukup teruji dalam menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang dapat memrakporandakan bangunan kebangsaan kita. Kita memang patut berbangga atas prestasi yang sudah kita raih. Tetapi kita tidak boleh lengah terhadap hadirnya “tangan-tangan jahil” yang tidak menghendaki Indonesia utuh dan berjaya.³

Pendidikan merupakan proses transformasi budaya dan nilai-nilai luhur kepribadian, yang dilaksanakan secara sistematis dan terprogram.⁴ Pendidikan dalam proses mencapai tujuannya perlu dikelola dalam suatu sistem terpadu dan serasi. Salah satu tanggung jawab yang harus diemban oleh sekolah dalam memegang amanah sebagai seorang adalah mendidik peserta didik dengan baik. Baik itu dalam pengembangan potensinya ketaqwaannya, akhlaknya, pengetahuannya, ibadahnya, dan lain-lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

UNUGIRI
BOJONEGORO

³ Masdar Hilmy, *Islam, Politik & Demokrasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2014), hlm. 22.

⁴ Benni Setiawan, *manifesto pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Arus Media, 2006).

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Al-Anbiyā' [21]:107)⁵

Dalam ranah Pendidikan Islam, dijelaskan bahwa ajaran Islam ini bersifat *rahmatan lil alamin*. Sehingga misi kebenaran yang diangkat adalah bagaimana bisa berhubungan baik kepada sesama manusia, alam dan Tuhan. Jika kesadaran seperti ini dimiliki oleh rakyat Indonesia, maka konflik horizontal tidak akan terjadi. Kemudian dalam kebijakan pendidikan Islam yang sebenarnya berdampak positif pada dinamika pendidikan di Indonesia karena perubahan penentu kebijakan, pemerintahan, pemimpin, sistem dan secara tidak langsung juga perubahan dalam pengambilan kebijakan.

Pendidikan tinggi di seluruh dunia mengalami perkembangan dan transformasi yang sangat cepat sebagai respon terhadap berbagai kondisi global yang berlangsung dewasa ini. Tingginya pertumbuhan populasi menyebabkan pula peningkatan penyedia jasa pendidikan tinggi. Hal ini tidak lepas dari peningkatan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi, sebagai imbas dari kebutuhan untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang lebih baik. Penambahan jumlah pendidikan tinggi secara besar-besaran tersebut, juga diwarnai dengan penawaran berbagai jenis program, isi, struktur serta kualifikasi pendidikan yang ditawarkan.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi, sistem pengajaran dan pembelajaran, serta kondisi lingkungan belajar, telah membawa dampak

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, (Bandung: CV Jabal, 2010), hlm. 331.

perubahan pada penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut. Hal ini sebagai bentuk implikasi dan internalisasi dari berbagai kondisi yang terus berkembang, sehingga menstimulasi perguruan tinggi untuk berbenah dan berinovasi secara kontinyu guna meningkatkan kualitas dan mutu agar mampu bersaing dan tetap eksis dalam percaturan dunia pendidikan.⁶

Pendidikan merupakan suatu berkah dari Yang Maha Pencipta terhadap ciptaan-Nya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang ditakdirkan untuk memperoleh pendidikan. Perolehan pendidikan bukanlah merupakan suatu ikatan terhadap manusia itu melainkan untuk pembebasan manusia dari hakikatnya sebagai makhluk yang bebas dan berakal budi. Sebagai makhluk alamiah yang dilahirkan didalam lingkungan alamiahnya, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri posisinya didalam lingkungannya itu. Disinilah terletak kebebasan dan keterikatan manusia dalam proses pengembangan kemanusiaanya.⁷

Seorang alumni dulunya telah dididik dan diajarkan menjadi seorang mahasiswa sebagai “*agent of change*”, yaitu: bertugas untuk mengadakan pelaksanaan pendidikan dalam masyarakat kearah yang lebih baik, antara lain perubahan yang bersifat kemanusiaan. Dimana pengetahuan yang diterimanya dalam pendidikan dipakai demi pengabdian kepada masyarakat, agar hidup bermartabat.

⁶ A. Said Hasan Basri, “*Eksistensi Dan Peran Alumni dalam Menjaga Kualitas Mutu Fakultas Dakwah*” Jurnal Dakwah, Vol. XI, No. 1 (Tahun 2011): hlm. 138.

⁷ H. A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm.110.

Pendidikan juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupannya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (Adz-Dzāriyāt [51]:56)⁸

Sejalan dengan ayat diatas tujuan pendidikan menurut Al-Ghozali harus mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri pada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudharatan.⁹

Pendidikan dan kekuasaan adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisahkan, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, (Bandung: CV Jabal, 2010), hlm. 523.

⁹ Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

penting dalam membentuk perilaku masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga lembaga dan proses politik di suatu negara memberikan dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara. Hubungan tersebut adalah realitas empirik yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.¹⁰

Apa yang dilaksanakan alumni, bagaimanapun tidak terlepas dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Menurut Margono Slamet, dalam makalahnya “Arti dan Metode Pengabdian” yang dikutip oleh Drs. Agussalim Sitompul, dalam buku “Metodelogi Pengabdian Pada Masyarakat”, menyatakan ada enam macam bentuk kegiatan dalam masyarakat yaitu pendidikan pada masyarakat, pelayanan pada masyarakat, pengembangan hasil penelitian, pengembangan wilayah secara terpadu, kuliah kerja nyata, dan transfer teknologi.¹¹

Pengabdian seorang alumni juga tidak terlepas dengan rasio antara hasil pendidikan (output) dengan tujuan pendidikan yang dibutuhkan dalam masyarakat, hal ini berkenan dengan kesesuaian antara apa yang dihasilkan dengan apa yang diharapkan, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Makin besar kesesuaiannya makin efektiflah pendidikan. Masalah efektifitas pendidikan dalam masyarakat berkenan dengan¹²:

¹⁰ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

¹¹ Agussalim Sitompul, *Metodelogi Pengabdian Pada Masyarakat*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1993), hlm. 40.

¹² Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 499.

1. Kesesuaian jumlah tamatan yang dapat dihasilkan dengan jumlah tamatan yang diharapkan atau yang seharusnya dapat dihasilkan dalam setiap satuan pendidikan.
2. Kesesuaian mutu tamatan yang dihasilkan dengan mutu tamatan yang dapat diharapkan dalam menguasai kemampuan - kemampuan: kognitif, efektif, dan psikomotor.

Kemudian masalah kontribusi seorang alumni sedikit banyaknya berkenaan dengan¹³:

1. Ketersediaan lapangan pekerjaan dalam masyarakat.
2. Perkembangan dan perubahan yang cepat dalam jenis tugas-tugas tenaga pekerjaan. Jenis dan tugas-tugas pekerjaan dalam masyarakat tidaklah tetap, tetapi berubah, yang tidak jarang tidak dapat diikuti oleh lembaga pendidikan terutama sekolah yang mempunyai kurikulum yang relative tetap.
3. Mutu dan perolehan tamatan yang dihasilkan sekolah secara faktual, tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dunia kerja. Mutu layanan yang dibawah standard dan jumlah yang kurang atau berlebihan merupakan masalah inti dari pengabdian seorang alumni.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, di samping pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan

¹³ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, hlm. 400.

fungsinya itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individu. Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apakah berperan dalam pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan sosial keagamaan, sosial politik dan peningkatan sumberdaya manusia. Sehingga menjadikan pendidikan keagamaan lebih berkembang lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut: **“Peran Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Pada Ranah Pendidikan Keagamaan”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Sosial Keagamaan Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Peran Sosial Politik Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana Peran Peningkatan Sumberdaya Manusia Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Sosial Keagamaan Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Peran Sosial Politik Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Peran Peningkatan Sumberdaya Manusia Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁴
2. Alumni yaitu orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/peran> (diakses pada tanggal 24/04/2020)

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹⁵
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan segenap potensi peserta didiknya secara optimal, juga upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), dan jasmani anak didik. Menurut Syeh Naquib Al-Attas, pendidikan merupakan upaya dalam membentuk dan memberikan nilai-nilai kesopanan (*ta'dib*) kepada peserta didik. Apakah artinya pendidikan jika hanya mengedepankan aspek kognitif maupun psikomotorik apabila tidak diimbangi dengan penekanan dalam pembentukan tingkah laku (afektif).¹⁶
5. Keagamaan merupakan segala sesuatu yang memiliki sifat dalam agama atau yang berhubungan dengan agama.

1.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias

¹⁵ Undang-undang Nomor 32 Pasal 40 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ Adkirotun Musfiroh, “*Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter*” dalam Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter? (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. 28-29.

masih tetap ada. Untuk mengurangi *bias* maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam, maka penelitian ini dapat memberikan arti penting kepada khazanah keilmuan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk penelitian yang akan datang dalam rangka untuk penulisan tesis.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai data untuk kegiatan penelitian selanjutnya.
4. Menambah khazanah kepustakaan Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya

pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama, sehingga akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam bagian ini agar mudah dipahami, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 1

Orisinalitas penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Judul Tesis
1.	M. Zakariya. “Peran Alumni dan Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendidikan Etika Siswa di Madrasah Aliyah Ibnu Malik Burneh Bangkalan Madura”. 2013.	Peran Alumni suatu lembaga	Peningkatan pendidikan Pendidikan Etika Siswa di Madrasah Aliyah	Peran Alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Pada Ranah Pendidikan Keagamaan
2.	Moh Afifuddin Zuhri. “Pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat kepada komisi pemberantasan korupsi perspektif sadd Al Dhari’ah”. 2018	Penelitian tentang Dewan Perwakilan Rakyat	Menggunakan perspektif sadd Al Dhari’ah	Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Pada Ranah Pendidikan Keagamaan

3.	Nurush Shobahah. “penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah” 2015	Penelitian tentang Dewan Perwakilan Rakyat	Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah	
----	---	--	---	--

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang pertama sama- sama membahas tentang peran alumni suatu lembaga dan yang kedua dan ketiga persamaannya yaitu membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat, namun pada penelitian yang dilakukan oleh M. Zakariya yang membedakan yaitu lebih fokus pada peningkatan siswa dan penelitian oleh Moh Afifuddin Zuhri ini menggunakan perspektif *sadd Al Dhari'ah*, dan penelitian oleh Nurush Shobahah yaitu hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus membahas tentang peran sosial keagamaan, peran sosial politik dan peran peningkatan sumber daya manusia alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro pada ranah pendidikan keagamaan.